

KEBIJAKAN PERDAGANGAN AS ERA BIDEN-HARRIS

Rachmi Hertanti

Direktur Eksekutif IGJ



Indonesia for Global Justice



“When I think about climate change, the word I think of is ‘jobs,’” Biden said in a July campaign speech announcing his \$2 trillion climate plan

- Agenda ekonomi Biden adalah agenda iklimnya; agenda iklimnya adalah agenda ekonominya.
- Pemerintahan Biden mengusulkan pengeluaran \$ 2 triliun selama empat tahun untuk proyek energi bersih dan mengakhiri emisi karbon dari pembangkit listrik pada tahun 2035 --- biaya ini akan diambil dari kebijakan kenaikan pajak untuk orang Amerika yang kaya dan meningkatkan tarif pajak perusahaan menjadi 28%.
- Pengadaan federal energi terbarukan, baterai dan kendaraan listrik, reorientasi pembelian energi pemerintah federal pada sumber daya bersih, mengakhiri sewa bahan bakar fosil dan memperlancar pengembangan energi terbarukan di tanah milik federal, dan merevisi efisiensi energi dan kendaraan.
- Pembiayaan stimulus untuk perusahaan juga digelontorkan demi mensukseskan agenda climate.



Agenda perdagangan Pemerintahan Biden

Membuka kemungkinan multilateralisme.

- Menjanjikan upaya diplomatik untuk “*memodernisasi*” aturan WTO. Sehingga tetap berpegangan pada rencana WTO Reform.
- Agenda perdagangan Biden terkait dengan komitmen Climate: *menyerukan larangan global atas subsidi bahan bakar fosil, mengenakan tarif impor terhadap produk yang menghasilkan banyak karbon, dan kesepakatan perdagangan yang mencakup komitmen untuk mengurangi emisi (Environmental goods & services)*
- Pemberian tarif diperbatasan terkait dengan produk yang tidak ramah lingkungan juga telah diterapkan di Uni Eropa sebagai bagian dari agenda “EU Green new deal”.
- Kebijakan ketat untuk Pengadaan Barang dan Jasa --- “Buy America”
- Dorongan untuk memasukkan komitmen Paris ke kesepakatan perdagangan AS-Meksiko-Kanada, dan Trade agreements lainnya.

▪ WTO Reform – setting ulang aturan global oleh negara Maju:

1. AS membuat Appellate Body WTO tidak berfungsi
2. Melakukan re-definisi terhadap negara berkembang. Kriteria yang diusulkan oleh AS soal “Developing Country Graduation” : *membership or accession to OECD; membership of G20; classified as ‘high income’ by the World Bank; or a country with 0.5 per cent or more of global merchandise trade.*
3. No DDA Commitment VS Mendorong pemassifan pembahasan Isu-isu baru seperti: Investment Facilitation, E-Commerce, services domestic regulations, competition, etc.
4. Pilihan untuk memperbanyak plurilateral untuk kesepakatan isu-isu baru daripada aturan multilateral, untuk menghindari deadlock – *WTO Menerapkan prinsip consensus & single undertaking.*

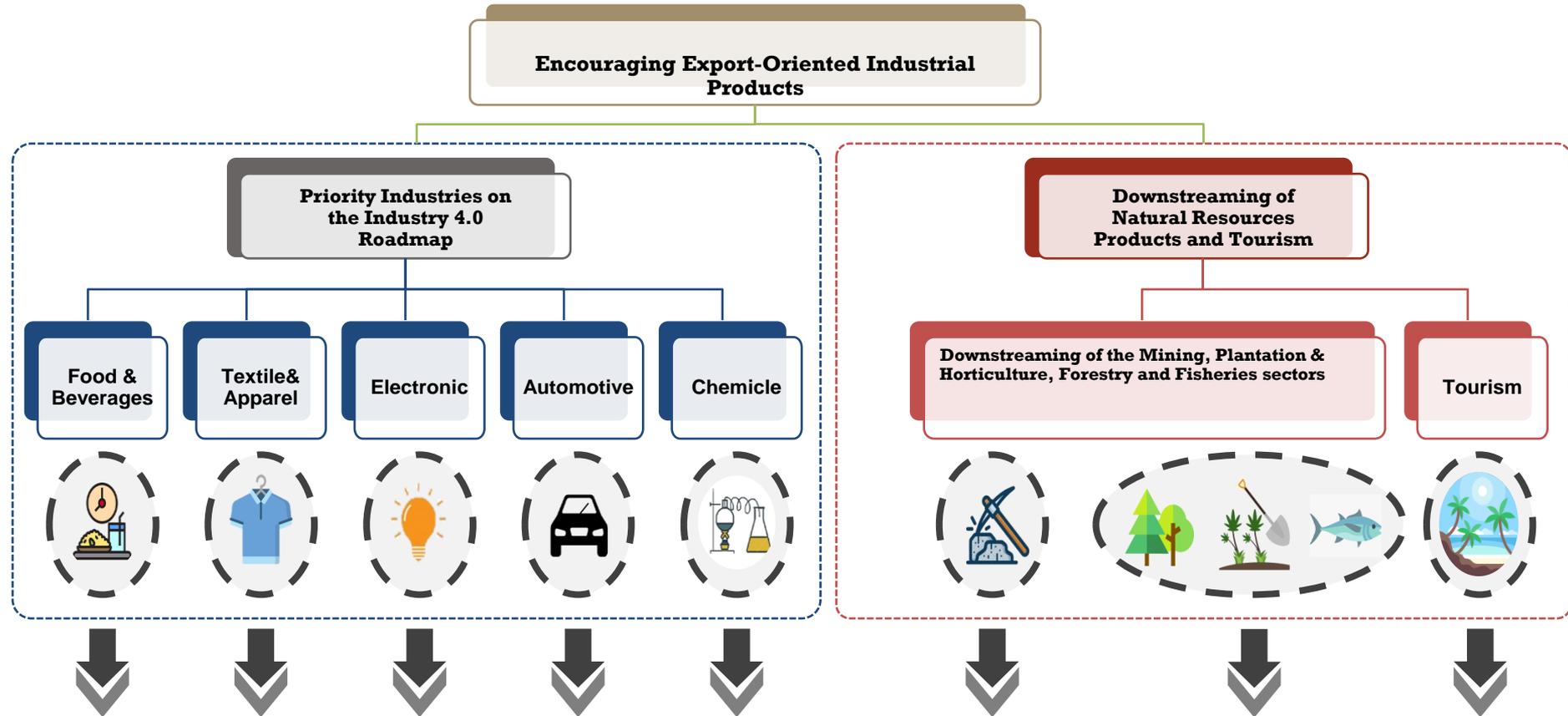


Indonesia Dalam Kebijakan Perdagangan AS

- Indonesia dan Amerika Serikat pada November 2020 menandatangani perjanjian senilai US \$ 750 juta untuk membiayai proyek perdagangan dan infrastruktur seiring upaya kedua negara untuk memperkuat hubungan ekonomi.
- Indonesia baru-baru ini mendapatkan status penerima manfaat berkelanjutan dalam program sistem preferensi umum (GSP) Amerika Serikat, yang diharapkan dapat membantu Indonesia meningkatkan eksportnya ke - dan keseluruhan perdagangan dengan - ekonomi terbesar di dunia. Dalam program tersebut, Indonesia dapat mengekspor 3.572 jenis produk ke AS tanpa tarif. Sejauh ini, negara baru mengekspor 729 produk unggulan tersebut.
- Perpanjangan GSP menegaskan kembali komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus mengoptimalkan kerjasama ekonomi dan perdagangan kedua negara, Indonesia akan mengajukan negosiasi **Limited Trade Deal (LTD)** atau perjanjian perdagangan terbatas antara Indonesia dan AS.
- “The LTD yang akan mencakup kerjasama perdagangan dan investasi di **bidang informatika, komunikasi dan teknologi** diharapkan dapat meningkatkan perdagangan dua arah antara Indonesia dan AS hingga mencapai US \$ 60 miliar pada tahun 2024,” ujarnya.



GOVERNMENT'S PRIORITY SECTOR IN INCREASING THE PRODUCTION ADDED VALUE (PROCESSING INDUSTRY)



Breakthrough

Machine Modernization

Modernization of Machinery with Tax Facilities

Completion of Facilities Income Tax Article 23

Revised PPnBM Structure

Imported Raw Materials (Naphtha Condensate & Ethylene)

Realizing Indonesia's Potential as the World's Largest Producer of Nickel (Mobil-E battery material)

Downstreaming of Products and Increasing Value Added and Exports

Development of New Travel Destinations